

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur :**

Chazawi Adami. *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*.

Malang: Bayumedia. 2005. Halaman 151

Hamzah Andi. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*.

Jakarta: Rineka Cipta. 1993. halaman 119

Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2015;

Harahap M. Yahyah, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:*

*Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Ghalia, 2007.

Lamintang P. A. F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra

Aditya Bakti, 2013;

Marpaung Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Jakarta: Sinar

Grafika. 1992. halaman 300

Sianturi S. R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3.

Jakarta: Stora Grafika, 2002;

Soepardi Prapto. *Study Tentang Akibat Hukum Surat Dakwaan*. Surabaya: Usaha

Nasional. 1991. halaman 11-12

Sugiarto Totok. *Pengantar Kriminologi*, Jagad Media Publishing, Surabaya, 20017.

Halaman. 1

Surat Edaran Jaksa Agung 4/1993 jo. Pasal 143 ayat (2) huruf b

Surat Edaran Jaksa Agung 4/1993 jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) huruf a  
KUHAP

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat  
Dakwaan (SE Jaksa Agung 4/1993)

Projohamidjojo M. Tanya Jawab KUHAP. Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982,  
hlm 14

Tirtaamidjaja M.H Kedudukan Hakim Dan Jaksa, Gita Karya Jakarta 1953. Hlm 1-5

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan Surat  
Dakwaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 182 ayat (4) tentang Hukum Acara  
Pidana ("KUHAP")

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 24 Ayat 1

### **Artikel/Jurnal**

Damayana, Gita Putri (13 November 2014) "Mengapa Kita Perlu Melakukan Revisi  
KUHAP Dan Mengapa Sebaiknya Tidak Dilakukan  
Sekarang". PSHK.or.id (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia).  
Diakses 1 Januari 2023

Sudarto. 2018. Hukum pidana satu semarang Yayasan sudarto

Hidayat, Rofiq (7 Mei 2019) "Mengulas KUHAP Disertai Perubahan Akibat Putusan MK". HukumOnline.com. Diakses 1 Januari 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ericha Cahyo Maryono Kendala Yang Dihadapi Jaksa Penuntutan Untuk Melakukan Pra Penuntutan Dalam Rangka Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum

### **Internet**

<https://rasindogroup.com/penanganan-laporan-polisi-tentang-tindak-pidana>

<https://rasindonews.wordpress.com/2022/06/09/penanganan-laporan-polisi-tentang-tindak-pidana/>

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/28/142706569/contoh-surat-tuntutan-pidana>